

**TAFSIR PANCASILA:
SEBUAH TELAHAH NILAI-NILAI ISLAM DALAM AL-QUR'AN**

Nur Mutmainnah

Universitas Negeri Jakarta

ABSTRACT

Determination of the basic ideology of the State of Indonesia is still in the debate, although the Five Principles (Pancasila) has been determined. The problem is that there are pros cons concerning the determination of Pancasila or Islamic Shari'ah as an ideology in this State. This paper tries to reveal the early history of the formulation of ideology in Indonesia. Then, to find a middle ground with a review of synchronization of Islamic values in the Qur'an with the values of Pancasila. Finally, this article concludes that there are similarities between the values of Pancasila with Islamic values contained in the Qur'an.

PENDAHULUAN

Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan yang kemudian melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, ideologi bangsa juga menunjukkan eksistensi yang sama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, ideologi dasar negara yang ditetapkan adalah Pancasila. Maka dari itu, Pancasila memiliki esensi yang sangat penting bagi kehidupan warga bangsa ini.

Akan tetapi, perjalanan Pancasila sebagai sebuah ideologi tidak selalu berjalan lancar pada prakteknya. Perdebatan mengenai hal ini terus bergulir sejak awal perumusan Piagam Jakarta.¹ Permasalahannya terletak pada pencantuman kata-kata untuk memberlakukan syari'at Islam di Indonesia. Bagi pahlawan Islam yang saat itu terlibat dalam proses kemerdekaan, mereka mengusulkan ide tersebut. Namun bagi kaum nasionalis yang juga sama-sama Muslim, mereka lebih mementingkan Pancasila atas dasar persatuan seluruh golongan, bukan sepihak dari kalangan mayoritas saja.

Kemudian perdebatan masih terus berlanjut hingga saat ini. Dengan motivasi yang berbeda, para pemeluk Islam (terutama garis keras) tetap menuntut agar syari'at Islam ditetapkan sebagai ideologi dasar Negara ini.

Tafsir yang dimaksud dalam tulisan ini adalah makna yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kemudian maknanya dapat digali melalui berbagai perspektif.

Tulisan ini dibuat bukan untuk menambah deretan panjang perdebatan, melainkan berusaha mencari jalan tengah atau titik temu dalam pro kontra antara pancasila dengan syari'at Islam. Yaitu dengan cara menelaah lebih dalam tentang sinkronisasi nilai-nilai Islam dalam Al-Qur'an dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, akan ditemukan solusi untuk kemaslahatan umat secara universal.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka. Data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari buku-buku, serta media lainnya seperti *digital software* yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Langkah-langkah penelitian untuk memperoleh data secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut: (1) mengamati fenomena yang masih menjadi perdebatan, yaitu pro kontra Pancasila dengan Syari'at Islam; (2) mengaitkan isi Pancasila dengan inti ajaran Islam atau nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, melalui fasilitas mesin pencari yang tersedia dalam Al-Qur'an digital; (3) mencari solusi dan menarik kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan.

SEJARAH SINGKAT AWAL PERDEBATAN: PANCASILA VS. SYARI'AT ISLAM

Indonesia adalah Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, 88% (sekitar 175 juta) penduduknya diklasifikasikan sebagai pemeluk Islam.² Walaupun demikian, negeri ini tidak menjadi negara Islam. Negara tidak menghendaki Islam menjadi sebuah ideologi politik yang dapat mengintegrasikan seluruh

orang Islam dalam suatu konteks nasional yang lebih luas.³ Akan tetapi lebih memilih ideologi yang bersifat nasionalisme untuk mencakup seluruh golongan.

Berawal dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) beberapa bulan menjelang kemerdekaan. Panitia ini dilantik pada 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Anggota BPUPKI berjumlah 68 orang, dan pertimbangan kekuatan politik BPUPKI hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik golongan Islam. Dengan demikian, hanya 20% saja yang mewakili aspirasi politik kelompok pendukung dasar Islam bagi Negara yang hendak diciptakan.⁴

Masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam BPUPKI yaitu mengenai persoalan bentuk Negara, batas Negara, dasar filsafat Negara, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pembuatan suatu konstitusi. Namun ada hal menarik di sini, yang menjadi perdebatan seru antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam adalah masalah dasar falsafah Negara. Di satu sisi, kelompok pendukung dasar Islam dalam BPUPKI ingin melaksanakan seluruh isi syari'ah yang sudah ada tanpa reformulasi tuntas dengan menghubungkannya dengan ajaran etik Al-Qur'an.⁵ Di sisi lain, kelompok nasionalis menganggap bahwa agama merupakan urusan pribadi seseorang, selain itu khawatir kalau Indonesia bagian timur, yang umumnya beragama Kristen, akan melepaskan diri dari Republik Indonesia jika syari'ah diberlakukan bagi semua orang.⁶

Akhirnya, sebuah kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dapat dicapai. Piagam Jakarta sebenarnya adalah sebuah *preamble* bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya, Pancasila telah disepakati, yaitu ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, kesejahteraan, dan demokrasi. Tapi pada sila pertama: “Ketuhanan” yang diikuti anak kalimat “...dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diperselisihkan. Bagi kelompok Islam, anak kalimat tersebut dianggap penting, karena dengan itu tugas pelaksanaan syari’at Islam secara konstitusional terbuka dalam waktu yang akan datang.⁷

Pada awalnya, pemberlakuan syari’at Islam disetujui oleh panitia dan telah disepakati dan ditetapkan. Sukarno, sebagai ketua panitia kecil, mengharapkan agar semua pihak menerima hasil kompromi tersebut, terutama wakil-wakil yang beragama Kristen, walaupun hal tersebut merupakan pengorbanan dan mau tidak mau mereka harus berbesar hati menerima keputusan tersebut. Perumusan konstitusi 1945 diterima dengan aklamasi pada 16 Juli 1945. Akan tetapi, tujuh anak kalimat dalam sila pertama tetap menjadi permasalahan bagi sebagian anggota BPUPKI, terutama kelompok agama minoritas, setelah pernyataan proklamasi. BPUPKI megakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama Indonesia, yang menghendaki sebuah republik kesatuan dengan jabatan kepresidenan yang sangat kuat, dan menetapkan negara baru tidak hanya meliputi Indonesia saja, melainkan Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan (Borneo). Soekarno mendesak agar versinya tentang nasionalisme yang bebas dari

agama disetujui. Karena konsep ini memang merupakan satu-satunya dasar yang dapat disepakati pemimpin lainnya, maka menanglah Sukarno.⁸ Setelah melewati masa-masa yang kritis, pada tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya wakil-wakil umat Islam menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Namun pada sila pertama. Kata “Ketuhanan” diberi tambahan atribut kunci, sehingga menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Dengan demikian, berakhirlah perdebatan tentang konsep ideologi. Yang kemudian ditetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan.

Sebenarnya, ketika menengok sejarah yang lebih lampau lagi, maka akan ditemukan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan pertimbangan dari kelompok nasionalis yang mengusulkan pancasila. Sebab, tokoh nasionalis sekaliber Sukarno dan Hatta merupakan muslim yang taat.

Dalam buku *Di bawah Bendera Revolusi*,¹⁰ Soekarno sering bercerita mengenai pemikirannya antara Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Menurutnya, tidak ada yang menghalangi Nasionalis dalam gerak-kerjanya, untuk bekerja sama dengan kaum Islamis dan Marxis. Bukan mengharap Nasionalis berubah paham menjadi Islamis atau Marxis, bukan maksud menyuruh Marxis dan Islamis berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian bersama yaitu kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu.¹¹ Selain itu, Soekarno pun sering mengirim surat kepada *A. Hassan*, Guru Persatuan Islam (PERSIS), untuk menanyakan serta mendapat jawaban seputar masalah keislaman.¹²

Indikasi tersebut telah mengantarkan kita pada pengetahuan tentang pemikiran Soekarno dalam konsep Nasionalisnya. Maka alasan Pancasila ditetapkan sebagai ideologi sebenarnya telah melalui pengalaman berpikir panjang Soekarno, dengan tidak menafikan Islam sama sekali.

SINKRONISASI ISI PANCASILA TERHADAP NILAI-NILAI ISLAM

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa alasan Pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa yaitu demi persatuan semua pihak, persatuan seluruh penduduk Indonesia. Dengan tidak melupakan kaum Islamis di masa itu, Pancasila memiliki esensi penting mengenai keagamaan. Namun, hal yang juga penting untuk diketahui oleh umat Islam, menurut Munawir Syadzali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai Ideologi negara tidak semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, melainkan juga karena Al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam.¹³ Sehingga Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

Berikut penjelasan mengenai kesamaan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an:

SILA PERTAMA = KETAUHDAN DAN HABLUM MIN ALLAH

Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai *kehalifah fil-ardhi*, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana (*supra natural being*).¹⁴

Hakikat tauhid di dalam Al-Qur'an sangat jelas termaktub dalam surat Al-Ikhlash ayat 1-4, yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepada-Nya segala sesuatu bergantung. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi saw. yaitu mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya. Keesaan Allah meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada zat-Nya, Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada afal-Nya. Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhlukpun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada af'al-Nya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya.¹⁵

Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila, yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu, meskipun berbeda

agama. Allah tidak pernah memaksa hamba-Nya untuk menyembah kepada-Nya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam mengenai bertuhan yaitu **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ**, yang tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa.

Dalam sila ini, terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dalam Islam disebut *hablum min Allah*. Dalam berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Dengan demikian terdapat keterikatan yang yang kemudian melahirkan komitmen (dimensi akidah). Komitmen ini pun tampak dari pernyataan setiap muslim ketika menyatakan ikrar do'a *iftitah* "*inna shaalatii wa nusuki wa mabyaya wa mamaatii lillaahi...*". Jika setiap muslim menghayati makna ikrar tersebut, maka sesungguhnya kesaksian tersebut harus diupayakan wujud aktualnya dalam kehidupan dengan sungguh-sungguh.

Berkaitan dengan tauhid, sebelumnya kita mempelajari dahulu mengenai iman, yang tersusun dalam beberapa rangka atau cabang, yaitu:¹⁶

- a. *Aqidah*, membahas asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagad raya dan kekuatan supranatural yang ada. Pembahasan akidah sangat erat kaitannya dengan tauhid.
- b. *Syari'ah*, terbagi atas ibadah khusus (*mahdhab*/ritual) dan mu'amalah (ibadah sosial). Sedangkan ibadah sosial mencakup beberapa bidang, antara lain bidang keluarga

(*al-ilah*), kemasyarakatan (*as-siyasah*), ekonomi (*al-iqtisadiyah*), pendidikan (*at-tarbiyah*), kesenian dan kejasmanian.

- c. *Akblaq*, membahas mengenai tatakrama dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa dan bernegara.

Lalu, tauhid yang merupakan inti akidah Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Ushuluddien, yang juga disebut ilmu ma'rifat, ilmu kalam atau teologi Islam.
- b. Monoteisme, yaitu mempercayai satu Tuhan, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlâs ayat 1-4.

SILA KEDUA = HABLUM MIN AN-NÂS

Sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya (*Hablum Min An-Nâs*). Apabila dalam *hablum min Allah* kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam *hablum min an-nâs* hubungan manusia dengan sesama manusia, dan berada dalam posisi *khalifah fil-ardhi*.

Dalam isi sila ini berkaitan dengan syari'ah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial, yang mencakup bidang kemasyarakatan (*as-siyasah*), yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 177, Allah menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan, yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial.

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaiikat-malaiikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Selain itu, dalam Al-Qur'an pun Allah tidak melarang umatnya berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama, ini menandakan sikap saling menghormati harus kepada semua kalangan, sesuai dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*,

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Mumtahanah: 8)

Kemudian pada ayat lain juga disebutkan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Sikap saling mengenal pada perintah ayat di atas maksudnya yaitu jika sesama manusia saling mengenal, maka akan timbul sikap saling

hormat-menghormati. Salah satu cara manusia untuk mengenal yaitu dengan berdialog. Dialog dapat memunculkan keterbukan berbagai pihak, yang pada akhirnya akan timbul sikap saling mengetahui satu sama lain, dan juga melahirkan sikap saling menghormati. Sehingga di sinilah letak beradabnya manusia.

Ayat 13 di dalam Q.S Al-Hujurat tersebut juga memberikan satu landasan tindakan kemasyarakatan umat Islam, bahwa dalam pergaulan kemasyarakatan dan hubungan antarbangsa, umat Islam tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya, yang secara khusus di dalam membangun kerja sama, saling mengerti dan menghargai satu sama lain.¹⁷

SILA KETIGA = UKHUWAH

Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mencerminkan ide *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan manusia)¹⁸, dan *ukhuwah Islamiyah* bagi sesama umat Islam.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 103 dan 105,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَذُكِّرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

“Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara;

dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالَأْتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”.

Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan.

Persatuan yang perlu digaribawahi yaitu sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat, agar tercapai kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan penting tersebut ialah agar umat seluruhnya berdiri dalam satu barisan di hadapan musuh-musuh.¹⁹

SILA KEEMPAT = MUDZAKARAH (PERBEDAAN PENDAPAT) DAN SYURA (MUSYAWARAH)

Sila keempat berisi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu *Mudzakarab* dan *Syura*.”

Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam (karakteristik negara Islam). Uniknnya, prinsip syura ada di dalam Pancasila.

Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila di ambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan.

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159 Allah swt. berfirman,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا عَنْهُمْ
وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”

Sejalan pula dengan Q. S. Asy-Syuura': 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...

“(bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”

Makna alternatif yang diterangkan oleh para mufassir adalah bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing.²⁰

Sedangkan pada prinsip Mudzakarab, dimaksudkan sebagai suatu sikap penghargaan terhadap pendapat orang lain yang satu sama

lain cenderung berbeda. Namun dengan prinsip ini, dikembalikan lagi kepada rasa persamaan dan kesetaraan, bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, karena setiap jiwa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah dan di depan hukum Negara.

SILA KELIMA = ADIL

Sila kelima berisi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih spesifik lagi, bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rizki, berupa zakat, infak dan shadaqah.

Keadilan sosial berkaitan erat dengan *maqashid al-syari'ah* (sasaran-sasaran syari'at). Sedangkan *maqashid al-syari'ah* terdiri dari tiga aspek:²¹

- a. *Dharuriyat*, mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, seperti agama/*ad-dien*, jiwa/*nafs*, keturunan/*nashb*, akal/*'aql*, dan harta benda/*mal*.
- b. *Hajiyat*, yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, tetapi bobotnya di bawah kadar *dharuriyat*.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu perwujudan hal yang yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu, tuntutan selera, dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan-persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Qur'an mencela orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian. Seperti dalam surat Al-Humazah ayat 1-4,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ
فِي الْحُطَمَةِ ۝

“Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpul lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya²², dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (neraka).”

Akan tetapi Al-Qur'an tidak melarang orang untuk mencari kekayaan dengan wajar. Allah swt berfirman,

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan bendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Untuk itulah, Islam mewajibkan zakat (Q.S. Adz-Dzariyat: 19), memerintahkan shadaqah (Q.S. Al-Baqarah: 264), menyuruh infaq (Q.S. Al-Baqarah: 195), melarang praktek riba atau bunga (Q.S. Al-Baqarah: 275-276 dan 278), serta membolehkan jual beli (Q.S. Ar-Rahman: 9).

PENUTUP

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, yang merupakan esensi kehidupan manusia, baik untuk mengatur atau pun sebagai aturan. Dalam perjalanan sejarah, kita telah mengetahui bagaimana pro dan kontra perdebatan ideologi berlangsung, untuk memenangkan ideologi antara Pancasila dengan

Syari'at Islam. Hingga akhirnya tercetus keputusan yang telah disepakati bersama saat itu, untuk menetapkan Pancasila sebagai ideologi.

Akhirnya, terdapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara nilai isi dari Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu: sila pertama sama dengan ketauhidan dan *Hablum Min Allah*, sila kedua yaitu sejalan dengan *Hablum Min An-Nás*, sila ketiga yaitu sesuai dengan prinsip ukhuwah, sedangkan sila keempat pun sejalan dengan prinsip mudzakah (beda pendapat) dan syura (musyawarah), dan sila kelima yaitu sama dengan prinsip keadilan, yang khususnya dalam hal zakat, infaq dan shadaqah.

Su'ud, Abu, *Islamologi; Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffah; Menggali Potensi Diri*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Zubaedi, *Islam & Benturan Antarperadaban*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Digital, Versi 2.0, 2004.

Budiwanti, Erni, *Islam Sasak*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Dhiaudiddin, M. Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Huda, Nor, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

[Http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.asp?SuratKe=112](http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.asp?SuratKe=112), Tafsir Surat: AL-IKHLAS, diakses pada tanggal 10 Maret 2010.

Mukti, H.A. Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1991.

Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2008.

Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.

ENDNOTES

- ¹ Yang kemudian melahirkan Pancasila.
- ² Dr. Zubaedi, *Islam & Benturan Antarperadaban*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hlm. 168.
- ³ Dr. Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 69.
- ⁴ Nor Huda, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 120-121.
- ⁵ Nor Huda, *Islam Nusantara*, hlm. 121.
- ⁶ Dr. Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, hlm.71.
- ⁷ Nor Huda, *Islam Nusantara*, hlm. 121.
- ⁸ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2008, hlm.424.
- ⁹ Nor Huda, *Islam Nusantara*, hlm. 122.
- ¹⁰ Buku tersebut pernah di breidel (dihapus hak untuk terbit) pada masa Soeharto, sehingga buku *Dibawah Bendera Revolusi* menjadi bukti sejarah bagi segelintir orang yang sempat memiliki buku tersebut di era 1960-an. Buku ini ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri, dengan detail kronologis peristiwa yang berurut, seperti sebuah pengalaman hidup beliau sebelum dan setelah menjadi Presiden pertama R.I.
- ¹¹ Ir. Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964, hlm. 5.
- ¹² Ir. Sukarno, hlm. 235.
- ¹³ Dr. Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, hlm. 70.
- ¹⁴ Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffab; Menggali Potensi Diri*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 226.
- ¹⁵ http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.asp?SuratKe=112, Tafsir Surat: AL-IKHLAS, diakses pada tanggal 10 Maret 2010.
- ¹⁶ Prof. Dr. Abu Su'ud, *Islamologi; Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 141.
- ¹⁷ Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffab*, hlm. 383.
- ¹⁸ Dr. Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, hlm. 72.
- ¹⁹ Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema In i, 2001, hlm. 194.
- ²⁰ Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, hlm. 274.
- ²¹ H.A. Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1991, hlm.158-159.
- ²² Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah.